

KETIKA SEKOLAH SWASTA LEBIH RESPONSIF: APAKAH BIROKRASI MENJADI BEBAN SEKOLAH NEGERI?

Kamis, 30 Juli 2026 - Nurul Istiamuji

Setiap warga negara sejatinya berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, ramah, dan adil. Di atas kertas, sekolah negeri memegang kartu truf utama. Mereka berdiri dengan jaminan negara di belakangnya: alokasi anggaran APBN/APBD, kepastian fasilitas, struktur pemerintahan yang mapan, hingga perangkat pengawasan yang berjenjang.

Namun, realita di lapangan kerap menyajikan kontras yang mencolok. Ketika orang tua murid membutuhkan kepastian administrasi, respons cepat atas masalah belajar anak, atau perlindungan nyata bagi siswa, sekolah swasta justru mampu merespons dengan jauh lebih lincah dan empatik.

Mengapa institusi yang disokong penuh oleh ekosistem negara justru sering kali tertatih merespons kebutuhan publiknya sendiri? Apakah birokrasi dan tata kelola yang kaku telah menjadi beban berat yang melumpuhkan fleksibilitas sekolah negeri?

Rasio Kelas dan Tantangan Perhatian Individual

Salah satu perbedaan paling mendasar yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan pendidikan berada di dalam ruang kelas itu sendiri.

Di banyak sekolah swasta, kuota kelas diatur sangat terukur. Sebagai contoh, untuk jenjang kelas 1 SD, satu angkatan dapat dibagi menjadi 3 kelas dengan isi hanya sekitar 18 siswa per kelas serta didampingi oleh 1 wali kelas dan 1 guru pendamping (co-teacher). Sebaliknya, di sekolah negeri, pemandangan umum yang dijumpai adalah satu kelas yang dijejali oleh 28 hingga 32 siswa, dan seluruh proses pembelajaran serta pengawasan hanya ditumpukan pada 1 orang guru.

Ombudsman berpendapat bahwa sulit mengharapkan proses pembelajaran dan pengawasan berjalan maksimal apabila satu orang guru harus mengampu hingga 32 anak sekaligus. Menurut Ombudsman, ketika seorang guru negeri dibebani jumlah siswa yang melampaui batas ideal-ditambah kewajiban administrasi birokrasi yang menumpuk-maka perhatian individual (personalized attention) kepada siswa dipastikan akan tergerus.

Penanganan Bullying: Ketegasan Swasta vs. Pembiaran Akibat Overload

Dampak dari ketimpangan beban ini paling nyata terlihat pada isu krusial keselamatan anak, seperti perundungan (bullying).

Di sekolah swasta, ketika indikasi bullying muncul, pihak sekolah umumnya bertindak cepat dengan prosedur tindak lanjut yang jelas, tegas, dan transparan hingga ke tingkat pemanggilan orang tua. Sebaliknya, di sekolah negeri, sering kali ditemukan kasus di mana laporan bullying dari anak terkesan dibiarkan, dianggap sekadar "candaan anak-anak", atau tidak ditangani secara tuntas.

Ombudsman berpandangan bahwa pembiaran laporan perundungan di sekolah negeri bukan semata-mata karena guru tidak peduli, melainkan karena guru sudah mengalami pembebanan berlebih (overload).

Menurut Ombudsman, seorang guru negeri yang harus mengelola 30 lebih anak, mengurus puluhan formulir administrasi, laporan kinerja, dan dokumen SPJ, kerap kali sudah kehilangan kapasitas emosional dan waktu untuk melakukan intervensi konflik antarmurid. Ombudsman menilai kondisi ini menciptakan celah bahaya di mana lingkungan sekolah negeri berisiko menjadi tidak aman bagi tumbuh kembang anak secara mental maupun fisik.

Paradox Birokrasi: Ketika Prosedur Mengabaikan Rasa Aman

Dari kacamata pelayanan publik, situasi ini menunjukkan paradox yang memprihatinkan. Paradox tersebut antara lain, responsivitas perlindungan anak. Dengan adanya guru pendamping dan kelas kecil (18 siswa), sekolah swasta mampu mengawasi interaksi sosial anak secara presisi. Ombudsman berpendapat hal ini membuat tindakan pencegahan bullying dapat dilakukan sebelum berdampak fatal.

Berikutnya risiko abaikan laporan korban. Ombudsman menilai pada kelas negeri yang padat (28-32 siswa), laporan anak rawan tenggelam. Guru yang kelelahan secara administratif cenderung memilih penyelesaian pintas atau meminimalkan masalah karena tidak memiliki waktu untuk melakukan mediasi mendalam. Terakhir, akuntabilitas layanan publik yang terabaikan. Menurut Ombudsman, sekolah negeri seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anak. Ketika sistem birokrasi membuat guru lebih fokus pada "kertas laporan" daripada "keselamatan murid", maka fungsi mendasar pelayanan publik telah bergeser.

Dorongan Ombudsman

Untuk mengurai benang kusut ini dan mengembalikan fungsi sekolah negeri sebagai pelayan publik yang responsif, Ombudsman mendorong beberapa langkah transformatif. Pertama, Ombudsman mendesak pembentukan mekanisme SOP Anti-Perundungan yang responsif dan terukur di setiap sekolah negeri, lengkap dengan sanksi tegas bagi penanganan laporan yang diabaikan. Kedua, Ombudsman mendorong evaluasi ulang rasio ideal siswa dan beban kerja guru. Jumlah murid per kelas perlu dikurangi secara bertahap, terutama pada jenjang dasar, agar guru memiliki ruang emosional untuk mengawasi dan mendampingi anak.

Ketiga, Ombudsman berpendapat perlu dipertimbangkannya skema Guru Pendamping (Co-Teacher) atau Tenaga Bimbingan Konseling (BK) yang memadai di sekolah negeri untuk membantu penanganan dinamika perilaku dan kesehatan mental siswa. Keempat, Ombudsman mendesak pemerintah untuk memangkas beban birokrasi administrasi guru, sehingga waktu dan energi guru dapat tercurah sepenuhnya untuk mengajar, mendidik, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dari bullying.

Pada intinya, Ombudsman berpandangan bahwa keberhasilan pelayanan pendidikan negeri tidak hanya diukur dari angka kelulusan atau megahnya bangunan, tetapi dari sejauh mana setiap anak merasa aman, didengar, dan dilindungi saat berada di sekolah.

Birokrasi di sekolah negeri mestinya menjadi alat untuk menghadirkan rasa aman tersebut, bukan justru menjadi alasan atas lambatnya respons terhadap jeritan anak-anak korban perundungan. Sudah saatnya sekolah negeri bertransformasi menjadi ruang belajar yang tidak hanya ramah, tetapi juga cekatan dan tegas dalam melindungi seluruh muridnya.